

Judul : Pengintervensi Anwar Usman harus dielusuri
Tanggal : Kamis, 09 November 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

Pengintervensi Anwar Usman Harus Ditelusuri

ANGGOTA Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasarihu menegaskan publik berhak mengetahui pihak yang mengintervensi eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman.

Terlebih setelah Majelis Kehormatan MK (MKMK) mengungkapkan adanya intervensi yang mengganggu kemandirian hakim konstitusi. Namun, sayang MKMK tidak mampu mengungkapkan dari mana intervensi itu datang. "Publik berhak tahu pihak mana yang mengintervensi hakim MK," kata Masinton saat dihubungi kemarin.

Ia mengatakan motif kepentingan mengintervensi juga harus diungkap karena intervensi itu disebut sudah menginjak injak kemandirian hakim yang telah diatur dalam UUD 1945.

"Dalam putusan, MKMK menyatakan bahwa eks Ketua MK Anwar Usman sengaja diintervensi terkait putusan soal batas usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres),"

ujar Masinton.

DPR, sambungnya, juga harus menyelidiki dugaan skandal intervensi di tubuh MK tersebut supaya citra integritas benteng konstitusi itu kembali dipercaya publik.

"Ini skandal besar dan bukan sekadar pelanggaran etik hakim dan harus diselidiki tuntas. Lembaga DPR RI harus melakukan penyelidikan melalui hak angket skandal Hakim MK agar terang benderang dan ke depan integritas MK kembali dipercaya masyarakat," sambungnya.

Sebelumnya, Ketua MKMK Jimly Asshidiqie enggan buka suara tentang pihak yang mengintervensi paman Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka itu. "Tidak semuanya harus diungkap. Pokoknya itu jadi alasan kita berhenti dari jabatan ketua," ujarnya.

Secara terpisah, pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai berdasarkan UU MD3, hak angket tidak bisa menjadikan putusan

MK sebagai objek investigasi. Namun, jelasnya, hak angket bisa digunakan untuk menginvestigasi keterlibatan aktor-aktor kekuasaan ataupun administrasi pemerintahan melakukan penyalahgunaan kewenangan.

Di sisi lain, ia menilai putusan MKMK yang mencopot Anwar Usman dari kursi Ketua MK juga akan membuka sel sel kekuatan parpol lainnya di parlemen untuk menggunakan wacana hak angket. "Tim pemenang Prabowo-Gibran harus mengantisipasi dan memitigasi situasi ini dengan baik sebab hal ini akan dijadikan sebagai amunisi serangan secara sistematis oleh rival-rival politiknya," terangnya.

Ahmad menambahkan kemampuan untuk menggeser isu kontroversi dasar hukum putusan MK ke ranah perdebatan visi-misi capres-cawapres akan menjadi solusi untuk menghentikan serangan yang akan mendegradasi kredibilitas pasangan Prabowo-Gibran dan pemerintahan Presiden Joko Widodo. (AN/Fah/Sru/P-3)